

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Persepsi Masyarakat Pesisir Pantai

1. Pengertian Persepsi

Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu proses.¹ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang di miliki sehingga dia menjadi sadar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya.²

Bimo Walgito dalam bukunya bahwa persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut dengan proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.³

Pandangan lain tentang persepsi juga dijelaskan oleh Thoha, bahwa persepsi pada hakikatnya ialah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Sedangkan menurut Slamet, persepsi ialah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.⁴

Persepsi berhubungan dengan sensasi dimana sensasi mengacu pada pendeteksian diri terhadap energi dari dunia fisik, kemudian studi terhadap sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan mekanisme sensorik: sedangkan persepsi

¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hlm 880

² Indera Tantra, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III, Mei 2015, hlm 118

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset. 2004, hlm 88

⁴ Jayatri Manda Sari, La Harudu. *Persepsi Masyarakat Nelayan Pesisir Tentang Pentingnya Pendidikan Formal Di Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat*. Jurnal Penelitian Geografi Volume 3. No 4 Oktober 2018, hlm 3

melibatkan kognisi tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Kemudian kejadian-kejadian sensorik diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, secara budaya, pengharapan bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna terhadap pengalaman sensorik.⁵

Sarlito W. Sarwon dalam jurnalnya Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi inderawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat penginderaan.⁶

Beberapa pengertian persepsi diatas dapat disimpulkan yaitu bahwa setiap manusia sejak lahir diciptakan Allah sesuai dengan porsinya masing-masing, sehingga memiliki peran dalam kehidupan sosialnya dengan kemampuannya untuk berpikir secara alami. Disamping itu, manusia diberikan panca indera yang memiliki banyak fungsi untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Persepsi tersebut diperoleh dari suatu proses pengolahan informasi yang berasal dari panca indera dari lingkungan yang nantinya ditransformasikan ke otak untuk diseleksi sehingga bisa dapat menghasilkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau dari pegalaman sebelumnya. Dengan menimbulkan suatu pemikiran atau sudut pandang dalam berpikir atau berpersepsi untuk memandang dan menilai berbagai macam kondisi sosial yang terjadi dilingkungan hidupnya, baik dari segi kehidupan langsung maupun yang tidak berkaitan langsung.

Selain itu persepsi juga berarti proses dimana seseorang memperoleh informasi di lingkungan yang nyata untuk menggambarkan dan menjelaskan hal yang mereka peroleh sebagai penafsiran seseorang terhadap stimulus yang dipengaruhi dengan berbagai pengetahuan, dengan adanya

⁵ Robert L. Solso, dkk, *Psikologi Kognitif*, Jakarta : Erlangga, 2007, hlm 75-76

⁶ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya, Vol. 5, No 1 Januari 2015, hlm 121

stimulus tersebut maka sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.

2. Bentuk-bentuk Persepsi

Suatu proses pemahaman ataupun penafsiran terhadap rangsangan atau stimulus dari panca indera sehingga menyebabkan persepsi tersebut terbagi menjadi beberapa bentuk:

a. Persepsi melalui indera penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsikan sesuatu yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus-stimulus yang dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, sehingga akhirnya individu atau seseorang dapat menyadari hal yang telah dilihatnya.

b. Persepsi melalui indera pendengaran

Orang bisa dapat mendengar sesuatu yaitu dengan menggunakan alat pendengaran yang dinamakan telinga. Telinga merupakan salah satu alat yang dapat mendengarkan sesuatu yang berada disekitarnya. Dalam pendengaran sendiri seorang individu mampu mendengar segala hal yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Sehingga, apabila seorang individu bisa menyadari sesuatu yang didengarnya, maka dalam hal ini seorang individu dapat mempersepsikan atau merespon yang di telah didengarnya, sehingga terjadilah suatu pengamatan, persepsi, dan penafsiran.

c. Persepsi melalui indera pencium

Orang dapat mencium bau sesuatu dengan melalui indera pecium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam, sehingga stimulus tersebut berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada didalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang bisa dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Persepsi melalui indera pengecap

Indera pengecap ini terletak pada lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak. Sehingga akhirnya orang bisa dapat menyadari atau mempersepsikan melalui Indera Pengecap tersebut.

e. Persepsi melalui indera peraba

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperature. Akan tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulusstimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut diatas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan disamping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam hal ini, tekanan atau rabaan, stimulus secara langsung mengenai bagian kulit yang terkena rabaan atau tekanan tersebut. Stimulus ini dapat menimbulkan kesadaran yang lunak, keras, halus dan kasar.⁷

Bentuk-bentuk persepsi dari pengertian diatas yaitu bahwa setiap mempersepsikan sesuatu bukan hanya dengan indera penglihatan saja ataupun hanya menggunakan indera pengecap saja, melainkan dengan menggunakan panca indera yang lengkap maka stimulus-stimulus tersebut dapat bekerja dengan aktif untuk menghasilkan sebuah data atau informasi yang sangat akurat dan nyata, sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Dimana stimulus itu sifatnya kuat, maka hasil nantinya yang didapat juga sangat kuat atau lebih spesifik.

Sebagaimana dalam jurnal Eliska Pratiwi dkk. Menurut Irwanto Persepsi terbagi menjadi 2 yaitu persepsi yang sifatnya positif dan persepsi yang sifatnya negatif. Persepsi tersebut dihasilkan setelah seorang individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan. Dengan hal ini maka penjabaran mengenai pengertian persepsi positif dan persepsi negatif sebagai berikut:

- a. Persepsi Positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Dengan hal itu, maka dapat diteruskan dengan kearifan atau menerima dan mendukung obyek yang dipersepsikan.

⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004, hlm 90

- b. Persepsi Negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang dipersepsi. Hal itu dapat diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang dipersepsikan.⁸

Persepsi positif maupun persepsi negatif sangat mempengaruhi pada diri seorang individu dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukannya. Dengan adanya munculnya persepsi positif maupun persepsi negatif tergantung bagaimana seorang individu tersebut menggambarkan suatu pengetahuan dan suatu pengamatan dengan mempersepsikannya ketika melihat sebuah obyek-obyek yang berada disekitarnya.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Selain adanya bentuk-bentuk dari persepsi, maka persepsi juga banyak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dari Persepsi itu sendiri. Menurut Ahmad Mubarak dalam bukunya bahwa faktor utama yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a. Faktor Perhatian yaitu meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol seperti gerakan, pengulangan, kebaruan, kontrak. Sedangkan dari faktor internal sendiri yang menjadi penarik perhatian. Misalnya yaitu faktor biologis dan sosio psikologis.
- b. Faktor Fungsional meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, suasana emosi, latar belakang budaya dan kerangka rujukan (*frame of reference*)
- c. Faktor Struktural, yang mana menurut teori Gestalt ketika individu mempersepsikan sesuatu maka dia mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan bukan dari bagian-bagian.⁹

Faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi itu dihasilkan hanya dari psikologis manusia, mulai dari faktor biologis dan sosio psikologis sehingga dari manusia itu sendiri dilihat karakternya dari setiap masing-masing individu. Akan

⁸ Eliska Pratiwi, I Nyoman Surjana dan Iyus Akhmad Haris, *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES, Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol 11 No.1, 2019, hlm 286

⁹ Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999, hlm 110

tetapi, juga sangat mempengaruhi bagaimana dari manusia itu sendiri dengan memberikan tanggapan yang nantinya dapat menimbulkan sebuah persepsi.

B. Masyarakat Pesisir Pantai

1. Pengertian Masyarakat

Istilah kata masyarakat begitu tidak asing buat kita semua karena tanpa kita sadari bahwa kita juga termasuk bagian dari masyarakat itu sendiri yang berada ditengah-tengah masyarakat dan mengemban peran sebagai bagian darinya, tetapi terkadang banyak orang yang belum memahami arti dari masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas sendiri dan mendiami wilayah dan daerah-daerah tertentu. Dalam daerah-daerah tersebut mereka harus mengembangkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Masyarakat memiliki sebuah interaksi yang terjadi di dalamnya dan membentuk sebuah sistem sosial.¹⁰

Durkheim mengatakan bahwa masyarakat merupakan asas solidaritas, memiliki perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkokoh oleh adanya pengalaman emosional. Masyarakat menampilkan aspek solidaritas organis dan aspek solidaritas mekanis. Solidaritas organis adalah hasil evolusi dari solidaritas mekanis, sedangkan solidaritas mekanis terjadi dalam masyarakat maksudnya yaitu adanya kesadaran kolektif, kepercayaan, sentimen ruang lingkup hukum yang menekan (refresif) dan komitmen moral.¹¹

Yopi Ahmais Sakinah dalam Artikel Ilmiahnya menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup bersama dan memiliki tatanan kehidupan yang diikat oleh norma-norma dan adat yang ditaati dalam suatu lingkungan. Masyarakat juga memiliki hubungan dan interaksi sosial antara sesama anggotanya.¹² Salah satunya yaitu pada

¹⁰ Achmad Fama, *Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorong Semarang*, Sabda Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm 1

¹¹ Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial Dasar :Teori dan Konsep Dasar*, Bandung : Penerbit Eresco, 1995 Cet ke-8, hlm 30

¹² Yosi Ahmais Sakinah, *Potret Sosial Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota dalam Novel Berkisar Merah Karya Ahmad Tohari*, Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatra Barat Padang, 2017, hlm 1

masyarakat pesisir tepatnya didesa Pacar Kabupaten Rembang yang mana masyarakatnya tersebut bisa digolongkan termasuk masyarakat perkotaan, karena berada disebelah utara jalur pantura. Namun disisi lain, desa pacar juga disebut sebagai masyarakat pesisir karena berbatasan dengan laut pantai utara jawa, meskipun desanya berada disebelah utara jalur pantura.

Masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yaitu pola interaksi sosial yang terdiri atas komponen sosial yang teratur dan melembaga. Karakteristik sebuah sistem sosial, yaitu struktur sosial yang mencakup susunan status dan peran yang ada disatuan sosial yang memunculkan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antar status dan peran sosial tersebut. Masyarakat selaku bagian dari struktur sosial dapat melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹³

Munandar Soelaeman Dalam bahasa inggris masyarakat disebut *Society*, yang berarti kawan. Adapun kata Masyarakat itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yaitu *syirk* yang memiliki arti bergaul, dengan adanya saling bergaul ini, menyebabkan karena adanya bentuk aturan hidup yang disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial. Adapun menurut para ahli seperti Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin berpendapat bahwa masyarakat itu terbentuk adanya saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁴

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem, tradisi, konvensi dan hukum tertentu yang setara, serta mengarah pada kehidupan kolektif.¹⁵ Menurut Muthahhari sendiri dalam jurnalnya Sulfan dijelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu entitas yang riil, masyarakat memiliki tujuan akhirnya yang dimana golongan atau yang berimanlah yang dapat

¹³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015, hlm 53

¹⁴ Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial Dasar :Teori dan Konsep Dasar*, Bandung : Penerbit Eresco, 1995 Cet ke-8, hlm 63

¹⁵ Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari*, Jurnal Aqidah-Ta Vol.IV No.2, 2018, hlm 273

menguasai dunia. Dialektika antara golongan yang terus terjadi dalam babakan sejarah merupakan fakta empirik bahwa dalam organisme masyarakat senantiasa dapat terus mengalami pertempuran sampai akhir zaman.¹⁶

Beberapa pengertian masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang berada disuatu daerah dengan mematuhi sebuah aturan yang berupa sistem sosial, adat istiadat dan peraturan lainnya yang ada di wilayah tersebut. Sehingga oleh karena itu mereka mempunyai peran penting dan sebagai pelaku yang menjalankan peranannya diwilayah tersebut, masyarakat sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, dan masyarakat pesisir.

2. Pengertian Masyarakat Pesisir

Beberapa pengertian masyarakat yang sudah penulis paparkan bahwa masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, dan masyarakat pesisir. Salah satunya yaitu masyarakat pesisir yang mana penulis jadikan acuan sebagai kajian penelitian tugas akhir program sarjana. Masyarakat pesisir ini identik dengan pekerja sebagai nelayan, yang dilihat bahwasannya masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di sekitarnya yaitu hasil kekayaan laut untuk dijadikan sebagai kehidupan dan sumber pangan setiap hari.

Achmad Fama dalam jurnalnya dijelaskan mengenai masyarakat pesisir yaitu masyarakat yang hidup didaerah pantai, yang mana sebagai masyarakat yang hidup dekat dengan wilayah perairan maka mata pencaharian mereka pada umumnya adalah nelayan. Sedangkan wilayah pesisir atau kampung nelayan yaitu permukiman yang letaknya tepat berada di bibir pantai, permukiman nelayan adalah perkampungan yang mendiami daerah kepulauan sepanjang pesisir termasuk danau dan sepanjang aliran sungai.¹⁷

Masyarakat pesisir dimaksudkan adalah masyarakat yang tinggal didaerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan

¹⁶ Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahari*, Jurnal Aqidah-Ta Vol.IV No.2, 2018, hlm 279

¹⁷ Achmad Fama, *Komunitas Masyarakat Pesisir di Tambak Lorong Semarang*, Sabda Volume 11, Nomor 2, 2016, hlm 2

sumberdaya laut dan pesisir melalui kegiatan penangkapan dan budidaya.¹⁸ Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai di Indonesia dikenal sebagai kawasan masyarakat miskin, kumuh dan terbelakang. Disamping itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, juga bertujuan untuk mendidikan agar nelayan lebih mandiri dan mempunyai kemampuan untuk hidup lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan berkelanjutan.¹⁹

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang mendiami wilayah sekitaran pesisir biasanya menggantungkan hidupnya pada laut sebagai sumber mencari penghasilan.²⁰ Dalam jurnalnya Iin Indarti menurut Ferdiansyah dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Muna, mengatakan bahwa masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai yang terkadang terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan wilayah pesisir.²¹ Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan. Sedangkan nelayan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil mempunyai definisi berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan

¹⁸ Derta Rahmanto, dan Endang Purwaningsih, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untung Jawa dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan*, Adil : Jurnal Hukum, Vol 7 No. 1, hlm 113

¹⁹ I Gusti Ayu Yogi Iswari, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya*, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 11 No. 2, 2019, hlm 511

²⁰ Serafim Kudu Mambang, dan Gabriela Dua Wellin, *Analisis Jurnal : Pelapisan Sosial-Budaya Pesisir Kelurahan Mangkang Kulon, Semarang*, Sabda Volume 13, Nomor 1, Juni 2018, hlm 4

²¹ Iin Indarti, dan Dwiyadi Surya Wardana, *Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang*. BENEFIT : Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 17, Nomor 1, Juni 2013, hlm 76

penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²²

3. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Secara sosiologis karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristiknya dari sumber daya yang dihadapi. Jika masyarakat agraris yang direpresentasikan oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relative bisa diproduksi. Karakteristik tersebut berbeda dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka.²³

Karakteristik masyarakat pesisir dapat diidentifikasi tergantung pada lingkungan, musim, dan pasar. Masyarakat nelayan pesisir juga dikenal dengan perilaku mengeksploitasi terus menerus tanpa memahami batas-batasnya disertai dengan merusak ekosistem. Perilaku merusak dianut oleh sebagian besar nelayan untuk sumberdaya yang sifatnya terbuka, dan perilaku konservasi ditunjukkan oleh komunitas adat atau lokal yang mengelola sumber daya perikanan untuk memperkuat kepentingan ekonomi kolektif.²⁴

Kelompok masyarakat nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat. Akibatnya terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan seperti nelayan penuh yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan. Nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang, juragan untuk mereka yang

²² Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan International*, Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 3

²³ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 7

²⁴ Arif Sofianto, *Kebutuhan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Pesisir Utara Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal PKS, Vol 16, No 2 Juni 2017, hlm 186

memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkap dan anak buah kapal (ABK) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan seperti kapal milik juragan.²⁵

Pengertian diatas mengenai karakteristik masyarakat pesisir yaitu bahwa masyarakat pesisir itu unik, mulai dari ciri khasnya, budayanya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Selain itu, masyarakat pesisir hidupnya masih bergantung dengan memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya misalnya seperti hasil kekayaan laut. Berbeda dengan masyarakat agraris, dari segi mata pencahariannya pun sangat berbeda.

Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya. Hal ini telah melahirkan sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial pada masyarakat nelayan. Namun, belenggu struktural dalam aktivitas perdagangan tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor yang menimbulkan persoalan sosial di kalangan nelayan. Faktor-faktor lain yang bersinergi seperti semakin meningkatnya kelangkaan sumberdaya perikanan, kerusakan ekosistem laut, keterbatasan kualitas, kapasitas teknologi penangkapan, dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Ketimpangan akses terhadap sumberdaya perikanan, lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan persoalan. Kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan sangat dirasakan di desa-desa pesisir yang perairannya mengalami *overfishing* (tangkap lebih) sehingga hasil tangkap atau

²⁵ Fanesa Fargomeli, *Interaksi Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Desa Tewil Kecamatan Sangai Kabupaten Maba Halmahera Timur*, Jurnal Acta Diurna, Volume III, No.3, 2014, hlm 4

pendapatan yang di peroleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, yaitu (1) pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anaknya, dan (3) terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan.²⁶

Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di Kelurahan Pacar Rembang dapat dilihat pada tingkat pendidikan nelayan, Mayoritas tingkat pendidikannya hanya sampai SMP, sedangkan yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SMA bahkan kuliah (Perguruan Tinggi) masih sedikit. Menurut Bambang Wardoyo selaku seksi ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat juga mengatakan bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Pacar masih sangat rendah, bahwasannya mereka masih mengandalkan untuk menjadi seorang nelayan untuk meneruskan jejak para orangtuanya. Maka dari itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa tersebut sangat rendah. Jadi, setelah membahas karakteristik tentunya dapat menguak dari bagian karakteristik masyarakat pesisir itu sendiri, sebagai berikut:

a. Pendidikan Masyarakat Pesisir

Kita ketahui bahwa masyarakat pesisir biasanya hanya lebih aktif dalam mencari ekonomi ketimbang harus berpendidikan tinggi, masyarakat pesisir selalu menganggap bahwa tanpa berpendidikan tinggipun mereka juga bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Bapak Gunawan selaku warga masyarakat Kelurahan Pacar Rembang, bahwa persentasi anak-anak di Kelurahan Pacar khususnya anak laki-laki memiliki jenjang pendidikan tingkat SMP. Anak laki-laki yang ada di Kelurahan Pacar memiliki kemampuan berlayar sejak kecil. Sehingga ketika libur sekolah mereka ikut berlayar dengan alasan agar mempunyai uang sendiri untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir dan warisan nenek moyangnya. Akibatnya tidak heran apabila pendidikan kurang diperhatikan dan rendahnya pendidikan di Kelurahan Pacar tersebut.²⁷ Menurut Bapak Gunawan, anak-

²⁶ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta: LKIS, 2007, hlm 4

²⁷ Gunawan, *Selaku Warga Masyarakat Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*

anak disana mempunyai perbedaan dari segi pendidikan dan ekonomi keluarga. Faktor yang mengakibatkan perbedaan tersebut adalah dari segi ekonomi dan kemauan dari diri anak di Kelurahan Pacar. Sebagai contoh yaitu keluarga dengan perekonomian yang cukup tetapi tidak di barengi dengan kemauan dari anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebaliknya anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cenderung berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Selain itu, lembaga pendidikan formal misalnya seperti SD yang berada di masyarakat pesisir dijadikan sebagai investasi ilmu pengetahuan yang nantinya dapat menghasilkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Disamping itu, dengan adanya diberikan mata pelajaran mengenai lingkungan pesisir laut kepada para peserta didik, maka disaat mereka dalam masa usia 10-20 tahun mendatang demi menyelamatkan masa depan sumber daya pesisir laut akan terus meningkat dan sangat meluas karena adanya kepeduliannya dan kesadarannya terhadap lingkungan pesisir tersebut.²⁸

Pendidikan bagi masyarakat nelayan di Indonesia belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, karena pendidikan masih jauh dari harapan untuk menjalankan fungsi-fungsi alokasi posisional secara mikro yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keadaan ini tentu menuntut adanya pembenahan dan pengembangan yang lebih jauh dan menjajikan masa depan.²⁹ Selain itu, menjadikan masyarakat pesisir kurang peduli dengan pendidikan, bahwasannya tingkat pendidikan di masyarakat pesisir terlalu rendah. Untuk itu, pendidikan juga harus dikembangkan dimasyarakat pesisir untuk menyelamatkan sumber daya laut harus diselamatkan oleh generasi baru, agar lingkungan di masyarakat pesisir juga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

b. Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial bersifat abstrak, perhatiannya atau analisisnya di tujukan pada pola-pola tindakan, jaringan-jaringan interaksi yang teratur dan seragam dalam waktu dan

²⁸ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm 118

²⁹ Baharudin, *Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan Pesisir*, Society : Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi, Edisi xi, April, 2014, hlm 65

ruang, posisi sosial dan peranan-peranan sosial. Tingkat dalam struktur sosial dapat pula menyangkut institusi-institusi sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan tingkat analisis struktur sosial didalam masyarakat secara garis besar memandang struktur sosial masyarakat mulai dari masyarakat sebagaimana halnya organisme hidup, masyarakat sebagai sistem sosial, masyarakat sebagai tertib sosial, dan masyarakat sebagai sub-stratum yang melahirkan konflik.³⁰

Kelompok masyarakat nelayan terbagi-bagi kedalam strata sosial-budaya. Penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan menurut Kusnadi, pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jarring dan perlengkapan yang lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi kedalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil.³¹

Kornblum Struktur Sosial merupakan pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial ini terdapat dua konsep penting yakni peranan dan status. Status sendiri adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, sementara peranan adalah aspek dinamis dari status. Untuk itu, struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya berciri ikatan *patron-klien* yang kuat yaitu konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Hal ini juga menjadi pemicu karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternative institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka. Kewajiban nelayan sendiripun adalah menjual hasil tangkapannya kepada langgan.³²

Koentjaraningrat, melihat pola *patron-klien* dalam kerangka jaringan sosial. Pola *patron-klien* merupakan pola

³⁰ Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial Dasar :Teori dan Konsep Dasar*, Bandung : Penerbit Eresco, 1995 Cet ke-8, hlm 29

³¹ Serafim Kudu Mambang, dan Gabriela Dua Wellin, *Analisis Jurnal : Pelapisan Sosial-Budaya Pesisir Kelurahan Mangkang Kulon, Semarang*, Sabda Volume 13, Nomor 1, Juni 2018, hlm 4

³² Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 39

hubungan yang didasarkan pada *principle of reciprocity* atau asas timbal balik. Juga menemukan istilah lain yaitu *dyadic contract*, atau hubungan antara dua satuan yang bekerjasama. Sementara itu, James Scott melihat hubungan patron-klien sebagai fenomena yang terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi.³³

c. Stratifikasi Sosial Masyarakat Pesisir

Stratifikasi sosial (*social stratification*) adalah pembedaan masyarakat dalam strata atau lapisan sosial-ekonomi, berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya, kepemilikan atau kekayaan dan status sosialnya atau kekuasaan sosial dan politiknya. Dengan demikian stratifikasi membeda-bedakan dan membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis, bertingkat-tingkat, dengan perwujudan adanya kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Pada stratifikasi sosial yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas berdasarkan sudut pandang ekonomi maka stratifikasi semacam ini bisa dikatakan stratifikasi sosial sistem terbuka. Setiap anggota masyarakat yang berada pada kelas ekonomi rendah bisa naik ke kelas ekonomi yang lebih tinggi, jika berhasil meningkatkan kualitas hidupnya. Begitu juga sebaliknya, setiap anggota masyarakat yang berada pada kelas ekonomi tinggi bisa turun ke kelas ekonomi rendah jika tidak bisa mempertahankan status ekonominya.³⁴

Istilah stratifikasi (*stratification*) berasal dari kata *strata* dan *stratum* yang berarti lapisan. Karena itu stratifikasi sosial (*social stratification*) sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang setara menurut ukuran masyarakatnya dikatakan berada dalam suatu lapisan (*stratum*). Stratifikasi sosial adalah sistem pembedaan individu atau kelompok dalam masyarakat, yang menempatkannya pada kelas-kelas sosial yang berbeda-beda pula antara individu pada suatu lapisan dengan lapisan lainnya. Sedangkan sistem stratifikasi sosial adalah perbedaan

³³ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 40

³⁴ Serafim Kudu Mambang, dan Gabriela Dua Wellin, *Analisis Jurnal : Pelapisan Sosial-Budaya Pesisir Kelurahan Mangkang Kulon, Semarang*, Sabda Volume 13, Nomor 1, Juni 2018, hlm 6

penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, yang diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dasar dan inti sistem stratifikasi masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dilihat dalam struktur sosial, sebagaimana yang dikemukakan Darmansyah sebagai berikut: Pertama, strata itu terbentuk berdasarkan latar belakang kemauan kebudayaan yang diaktualisasikan dalam bentuk kualitas individu dan kelompok. Kedua, setelah strata terbentuk kemudian lahirlah kelompok-kelompok yang dipandang inferior dan superior. Ketiga, adanya kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh kaum superior.³⁵

Pelapisan sosial sendiri dalam masyarakat bukan karena perbedaan melainkan, adanya kemampuan manusia menilai perbedaan itu dengan menerapkan berbagai kriteria. Bahwa menganggap ada sesuatu yang perlu dihargai maka, sesuatu yang ada tersebut menjadi bibit unggul untuk menumbuhkan sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat. Sistem lapisan sosial di dalam masyarakat sengaja dibentuk karena untuk mengetahui pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi formal, dengan tujuan agar masyarakat tersebut bisa hidup teratur, dalam suatu organisasi vertikal dan horizontal. Dan jika bila tidak dibuat sistem sosial dalam masyarakat maka bias kemungkinan besar terjadi suatu pertentangan yang dapat membahayakan keutuhan dalam masyarakat itu sendiri.³⁶

Stratifikasi pada masyarakat pesisir di Indonesia sangatlah beragam. Masyarakat yang kian berkembang dapat semakin terstratifikasi. Sebaliknya, masyarakat yang masih tradisional dengan semua nelayan masih menggunakan perahu dayung tanpa motor, maka stratifikasinya belum bisa dikatakan secara kompleks. Seiring dengan berkembangnya modernisasi, dapat terjadi differensiasi sosial yang tampak pada semakin bertambahnya jumlah posisi sosial atau jenis

³⁵ Binti Maunah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 3, No 1. Juni 2015, hlm 23-25

³⁶ Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial Dasar :Teori dan Konsep Dasar*, Bandung : Penerbit Eresco, 1995 Cet ke-8 hlm 90

pekerjaan. Maka dari itu, dengan terjadinya pula perubahan stratifikasi karena sejumlah posisi sosial tersebut tidaklah bersifat horizontal melainkan vertical atau berjenjang, secara bervariasi sesuai dengan ukuran ekonomi, prestise, dan kekuasaan. Pembagian tiga lapisan stratifikasi sosial nelayan, yaitu lapisan atas, menengah dan kebawah berdasarkan atas kekuasaan dalam menentukan posisi tawar bagi hasil. Lapisan atas adalah pemilik modal, lapisan menengah adalah orang yang dipercaya menukangi perahu dan menentukan hasil produksi oleh bos. Lapisan menengah mempunyai dua bagian dalam bagi hasil, sedangkan lapisan bawah adalah ABK yang menjual jasanya untuk bos.³⁷

Masyarakat pesisir memiliki sifat stratifikasi sosial yang terbuka, dimana setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh kedudukannya di dalam masyarakat, seperti kehormatan, kedudukan, kekayaan maupun pendidikannya.³⁸ Dengan adanya pemberian kehormatan tersebut hanya diberikan kepada orang yang hanya memiliki pengetahuan untuk dipercaya dan diutus di dalam masyarakat. Karena setiap masyarakat pasti memiliki kedudukan, kekayaan yang berbeda-beda tergantung bagaimana seseorang tersebut menghormatinya.

Masyarakat pesisir ini memiliki jaringan relasi patron-klien yang sangat kuat, beragam, dan mencakup banyak segi kehidupan sosial ekonomi mereka. Relasi tersebut terbentuk karena adanya konsekuensi dari karakteristik pekerjaan mereka sebagai nelayan, sekaligus melihat kondisi lingkungan dan sifat dari sumber daya alam yang menjadi basis perekonomian untuk kehidupan nelayan sendiri. Untuk menghindari ketidakpastian pendapatan nelayan demi kelangsungan hidup para masyarakat nelayan dan untuk mengembangkan jaringan hubungan tradisional yang bersifat patron-klien untuk menciptakan rasa aman sosial. Jadi, jaringan patron klien ini merupakan wadah dan sarana untuk menyediakan sumber daya jaminan sosial secara tradisional untuk kelangsungan hidup para nelayan. Selain

³⁷ Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 50

³⁸ Irene Agustina Aritonang, *Stratifikasi Sosial Masyarakat Pesisir di Kampung Nelayan Seberang Kelurahan Belawan 1 Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal : Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Pekanbaru, 2018, hlm

itu, dengan adanya relasi sosial patron klien terikat adanya kerjasama dan pertukaran sumber daya ekonomi atau jasa sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.³⁹

Setiap masyarakat yang telah atau sedang menjalani masa transisi dapat menunjukkan pola perkembangan yang dipengaruhi oleh gejala-gejala dan masalah-masalah khusus, berkenaan dengan situasi geografis, ekonomis, dan politis. Salah satunya adalah terjadinya suatu pergolakan dan perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan dalam menentukan arah dari gerak perubahan tersebut. Dimana tingkat kemampuan seseorang bisa diukur jika mereka memiliki sesuatu yang dapat dihargai, dan melahirkan lapisan sosial yang mempunyai kedudukan atas serta kedudukan yang rendah. Proses terjadinya sistem sosial sendiri yaitu secara berlapis-lapis dalam masyarakat yang mana dapat terjadi dengan sendirinya, atau sengaja yang disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama.⁴⁰

C. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan laut dan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah pesisir mendapatkan tekanan dari berbagai aktivitas dan fenomena di darat maupun di laut.⁴¹ Menurut UU No. 1 tahun 2004 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan permukiman pesisir dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukiman bumi yang dihuni manusia sebagai wadah dengan segala sarana dan prasarana penunjang kehidupan penduduk, yang menjadi kesatuan dan terletak pada wilayah daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang

³⁹ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta: LKIS, 2007, hlm 8

⁴⁰ Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial Dasar :Teori dan Konsep Dasar*, Bandung : Penerbit Eresco, 1995 Cet ke-8 hlm 90

⁴¹ Zulmiro Pinto, *Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 3, No. 3, Desember 2015, hlm 164

tidak tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi proses-proses laut.⁴²

Wilayah pesisir merupakan tempat yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan oleh masyarakat terutama masyarakat pesisir, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan religius, sosial kemasyarakatan maupun kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.⁴³ Bahwasannya dengan adanya pemanfaatan wilayah pesisir, dengan banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, seharusnya menjadikan wilayah pesisir tidak dapat mengalami kekurangan ataupun kemiskinan pada masyarakat pesisir.

Wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan dinamis yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Berkembangnya sejumlah sektor usaha, dengan sejumlah *Stakeholder* dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, tanpa adanya keterpaduan dalam pengembangannya justru dapat menciptakan konflik-konflik baru. *The world commisission on environment and development (WCED)* pada tahun 1987 memberikan batasan dalam pembangunan suatu kawasan, termasuk pesisir dan laut. Batasan tersebut meliputi 3dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi (efisien serta layak), sosial (berkeadilan), dan ekologis (ramah lingkungan).⁴⁴

Masyarakat pesisir dan wilayah pesisir yaitu sekumpulan orang yang tinggal disuatu wilayah yang berdekatan dengan laut yang disebut wilayah pesisir, yang mana memiliki ciri khas budaya yang menarik dan hidupnya bergantung dengan sumber daya alam yang ada dan memanfaatkan hasil kekayaan alam untuk dijadikan usaha dan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

⁴² Lisa Meidiyanti Lautetu, dkk. *Karakteristik Permukiman Masyarakat pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken*, Jurnal Spasial, Vol 6, No. 1, 2019, hlm 127

⁴³ Anak Agung Isti Ari Atu Dewi, *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat : Community Based Development*, Jurnal Pendidikan Hukum, Vol. 18, No. 2, Juni 2018, hlm 173

⁴⁴ Iin Indarti, dan Dwiyadi Surya Wardana, *Metode Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penguatan Kelembagaan di Wilayah Pesisir Kota Semarang*. BENEFIT : Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume17, Nomor 1, Juni 2013, hlm 76

D. Kondisi Masyarakat Pesisir

Pasal 21 UU 1 Tahun 2014 yang dengan tegas menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.⁴⁵ Dengan hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir yang menjadi peran penting untuk pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Dengan hal ini, konteks perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, pemberdayaan, adanya akses dan peluang, ramah lingkungan, pengakuan kearifan lokal dan keadilan gender juga merupakan dari nilai-nilai hukum adat, maka dari itu dengan adanya pemberdayaan pada masyarakat pesisir bertujuan untuk mengarahkan terwujudnya perbaikan dan pengelolaan wilayah dan masyarakat pesisir itu sendiri.

Kehidupan pesisir tidak jauh dari agama, etos kerja dan Gaya hidup nelayan. Pada umumnya banyak masyarakat nelayan yang terpencil posisinya secara geografi, dilihat dalam proses perubahan sosial-budayanya sendiri tercipu adanya barang, jasa, kapital dan manusianya yang secara timbal balik antara masyarakat nelayan dengan masyarakat yang berada didaerah perkotaan yang masih dekat berdekatan untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya banyak pembangunan sarana dan prasarana maka dapat terwujudnya mobilitas sosial. Disamping itu dengan terbukanya peluang untuk meningkatkan pendidikan sekolah dengan berbagai media dapat membantu masyarakat pesisir untuk meningkatkan pengetahuannya. Akan tetapi justru malah dengan adanya perubahan sosial tersebut telah didorong dengan gerak pembangunan yang belum memberikan manfaat secara merata terhadap masyarakat nelayan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, hanya bias menguntungkan pada kehidupan masyarakat nelayan secara substansial, seperti Gaya hidup masyarakat nelayan saja.

Agama dan kepercayaan juga menjadi pedoman bagi masyarakat pesisir, mereka menganggap bahwa agama ini menjadi unsur penting untuk membantu akses ke penguasaan pada sumber

⁴⁵ Anak Agung Isti Ari Atu Dewi, *Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat : Community Based Development*, Jurnal Pendidikan Hukum, Vol. 18, No. 2, Juni 2018, hlm 175

daya perikanan, agar diberi keselamatan saat berlayar dan memperoleh hasil tangkapan banyak saat melaut. Seperti halnya di masyarakat pesisir Desa Pacar Rembang, setiap tahun sekali diadakan yang namanya sedekah laut yang mana sedekah laut ini diadakan untuk rasa syukurnya masyarakat kepada sang pencipta. Adat dan tradisi sedekah laut disana yaitu larung sesaji yang nantinya dibawa ke tengah laut. Menurutny agar para pelaut diberikan selamat dan mendapatkan hasil tangkapan yang banyak.

Etos kerja yang dijelaskan dalam bukunya Kusnadi, bahwa orang pesisir ini identic dengan masyarakat yang peka, selalu memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaannya atau status sosial. Karena mereka juga dikenal dengan masyarakat yang mudah tersinggung, cepat marah, bahkan terkenal dengan orang yang keras. Dalam masyarakat sekarang ini jika ingin mendapatkan penghormatan mereka harus benar-benar memiliki modal sosial untuk bisa meningkatkan status sosialnya, biasanya orang-orang pesisir hanya bermodalkan pelibetan suami istri yang hanya bahu membahu untuk bekerjasama agar terwujud untuk bisa menjadi orang yang dihormati masyarakat lain misalnya haji. Suami yang hanya setiap hari menjadi seorang nelayan dan dibantu istri berdagang ikan, dan ada juga yang ikut kerja ke rumah tetangga untuk membantu magang ikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, yaitu Gaya hidup masyarakat pesisir dipengaruhi dari perilaku budaya konsumenrisme yang berorientasi untuk sekedar memuaskan kebutuhan psiko sosial individu atau keluarga nelayan. Pameran utama dalam reproduksi kapitalis masa kini, bahwasannya dalam gaya hidup masyarakat nelayan dilihat dari symbol ekonominya yakni, antara nelayan buruh dan bos nelayan, secara keseluruhan masyarakat nelayan sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman, tanpa bisa dibedakan mana yang berpenghasilan rendah dan mana yang berpenghasilan tinggi. Pada prinsipnya, masyarakat nelayan pada tingkat penghasilan yang tinggi dan kondisi perairan tempat mereka melakukan kegiatan penangkapan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar dan dapat cenderung bergaya hidup yang boros, dilihat dari ukuran normal berdasarkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.⁴⁶

⁴⁶ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta : LKis, 2007, hlm 95

E. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogic yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai *educare*, yaitu mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan di dunia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses perbuatan, dan proses mendidik. Ki hajar dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat.⁴⁷

Pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan. Dalam GBHN 1973, pendidikan artinya bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Bagi manusia sendiri pendidikan adalah suatu keharusan, karena pendidikan manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Pendidikan itu sangat luas menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia, selain itu pendidikan juga menyangkut hati nurani, nilai-nilai, perasaan, pengetahuan, dan ketrampilan. Sedangkan dalam arti luas pendidikan juga berarti suatu proses untuk mengembangkan semua aspek kepribadian manusia, yang mencakup: pengetahuan, nilai serta sikapnya dan ketrampilannya. Pendidikan bertujuan untuk mencapai kepribadian individu yang lebih baik.⁴⁸

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia dan ketrampilan yang diperlukan dirinya,

⁴⁷ Nurkholis, *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal Kependidikan, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm 25-26

⁴⁸ Achmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang : Universitas Negeri Semarang Press, 2010, hlm 28-30

masyarakat, bangsadan Negara. Pendidikan merupakan satu asset yang dihargai dalam masyarakat modern, biasanya dinili aspek tinggi. Pendidikan merupakan proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan sebagai sistem terencana yang memanusiakan manusia agar dapat eksis dalam masyarakat. Pendidikan dapat diperokoh dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik beradaptasi dalam konteks sosial, dan generasi ini dapat membawa pada stratifikasi dan mobilitas sosial di dalam masyarakat.⁴⁹

Pendidikan merupakan sutau proses yang mencakup tiga dimensi, individu, masyarakat atau komunitas nasional dari individu tersebut, dan seluruh kandungan realitas, baik material maupun spiritual yang memainkan peranan dalam menentukan sifat, nasib, bentuk manusia maupun masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Pendidikan juga merupakan sebuah aktifitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat sepenuhnya.⁵⁰

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara katif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan adanya pendidikan semua warga Negara bisa mengembangkan keilmuannya untuk bisa menggapai cita-citanya. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

⁴⁹ Binti Maunah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 3, No 1. Juni 2015, hlm 21-22

⁵⁰ Nurkholis, *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal Kependidikan, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm 24

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵¹

Fungsi pendidikan merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda.⁵² Pada intinya tingkat pendidikan untuk individual yaitu agar seorang individu bisa terbantu untuk selalu belajar dan seorang pendidik juga bisa terbantu untuk mengajarnya. Serta orang yang memiliki pendidikan tinggi ataupun yang berpendidikan tidak dapat merasa puas dan diharapkan memiliki kesadaran untuk selalu belajar dan terus belajar sepanjang hayat, bahwa dirinya merasa kurang pengetahuan, kurang informasi agar bisa terdorong untuk maju dan terus belajar.

Pendidikan itu bisa menyangkut seluruh aspek dalam kehidupan manusia, yang mana pendidikan sangat dibutuhkan seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, selain itu pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap manusia untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya serta memperluas pengetahuan seumur hidupnya. Jadi dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat terlihat dari segi pendapatannya, karena seseorang yang berpendidikan jauh lebih produktif dibandingkan dengan seseorang yang tidak berpendidikan. Produktifitasnya seseorang dilihat dari segi pengetahuan, ketrampilan, dan tindak tanduknya.

2. Lembaga Pendidikan

Lembaga secara bahasa adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut.⁵³ Jadi, lembaga pendidikan itu sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan untuk memberikan

⁵¹ Achmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang : UPT UNNES Press, 2010, hlm 163

⁵² Nurkholis, *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*, Jurnal Kependidikan, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm 29

⁵³ Ibrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 06, No. 11, Januari 2017, hlm 60

keilmuannya kepada peserta didik sesuai dengan misinya tersebut agar pendidikan layak untuk diperoleh setiap warga Negara.

Lembaga pendidikan mengemban amanah untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bertahan hidup dan membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara lokal, nasional, dan global atau humanisasi. Sedangkan institusi pendidikan berperan sebagai pusat penghayatan, pengembangan dan pembentukan jati diri kultural sebuah komunitas atau bangsa. Sistem pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan pencerminan dari upaya sadar sebuah bangsa untuk membangun keberlanjutan warisan budaya dan jati diri sebagai bangsa berdaulat dan bermartabat.⁵⁴

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang terencana, terstruktur, serta mempunyai jenjang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 11, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal memiliki jenjang pendidikan yang terstruktur dan sistematis, setiap jenjang atau tingkatan pendidikan formal tentu akan mempunyai standar kompetensi dan hasil yang berbeda, karena setiap tingkatan ataupun jenjang pendidikan melakukan sebuah pembelajaran yang berbeda dari segi ilmu yang diajarkan, sehingga pada tiap tingkatan pendidikan formal menghasilkan lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan yang berbeda-beda.⁵⁵

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan dimulai dari pendidikan PAUD/TK, setelah itu menginjak ke Sekolah Dasar, lanjut ke Sekolah Menengah Pertama, yang terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas. Untuk melanjutkan ke jenjang ke Perguruan Tinggi sesuai dengan keadaan orangtuanya ataupun keminatan pada peserta didik itu sendiri, tetapi dalam Indonesia sendiri sebisa mungkin untuk mewajibkan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang dimulai dari PAUD/TK, SD, SMP dan SMA.

⁵⁴ Al Musanna, *Indigenisasi Pendidikan : Rasionalitas Revitalisasi Praksis Pendidikan Ki Hajar Dewantara*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm 118

⁵⁵ Septian Kurnia dan Sugeng Muslimin, *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Formal Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas VIII dalam Mata Pelajaran IPS di SMP N 1 LemahAbang Kabupaten Cirebon*, Jurnal Edunomic, Vol. 5, No. 01, 2017, hlm 46-47

Pendidikan non-formal adalah pendidikan inisiatif dari masyarakat yang berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, dan penambah bagi pendidikan formal. Jalur pendidikan ini diatur oleh Negara, namun dengan intensitas yang lebih longgar dibandingkan sekolah formal yang *highly regulated*. Sementara itu Pendidikan Informal adalah inisiatif masyarakat yang biasanya lebih tidak terstruktur, meskipun demikian Pemerintah tetap membuka peluang untuk penyeteraan hasil Pendidikan Informal. Maka dari itu, anak-anak yang belajar menjalani homeschooling dapat memperoleh ijazah dengan proses mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ujian Kesetaraan terdiri dari tiga jenjang, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), Paket C (setara SMA). Ijazah Paket diperoleh melalui Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke Jenjang Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.⁵⁶

Lembaga non-formal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga Negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Kini, pendidikan non-formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkan ketrampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pendidikan non-formal ada pula yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olahraga, dan pramuka.⁵⁷

Lembaga pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat.⁵⁸ Pendidikan informal berperan penting dalam pewarisan nilai-nilai budaya dan pendidikan di masyarakat. Selain itu juga, Combs juga menyatakan bahwa pendidikan informal merupakan proses sepanjang hayat dimana seseorang memperoleh dan menghimpun pengetahuan, ketrampilan, sikap dan pandangan dari pengalaman terapan lingkungan di rumah, tempat kerja, tempat bermain, dari contoh perilaku dan sikap-sikap keluarga dan

⁵⁶ Iin Purnamasari, *Homeschooling dalam Potret Politik Pendidikan*, Journal Of Nonformal Education, JNE 3 (1), 2017 28-39, hlm 33.

⁵⁷ Ibrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 06, No. 11, 2017, hlm 61

⁵⁸ Ibrahim Bafadhol, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 06, No. 11, 2017, hlm 62

teman dari perjalanan.⁵⁹ Jadi pendidikan informal ini mengacu pada ketrampilan seseorang yang mana mereka mendapatkan pendidikan ini di lingkungan keluarga dan masyarakat saja.

Bagi para nelayan memang tidak ada pilihan lain, karena pekerjaan yang berhadapan dengan ancaman gelombang laut, ombak cuaca, dan kemungkinan terjadi karam saat melaut ke tengah lautan untuk menangkap ikan adalah merupakan pekerjaan turun temurun tanpa pernah belajar sebagai nelayan yang modern. Disaat menginjak remaja mulai diajak berlayar dan ikut melaut. Dengan demikian bahwa masalah sosial budaya terdapat pada kehidupan nelayan yaitu rendahnya tingkat pendidikan, miskin pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pekerjaannya, kurang tersedia wadah pekerjaan informal, kurangnya daya kreativitas, serta belum adanya perlindungan terhadap nelayan dari jerata para tengkulak.⁶⁰

Lembaga pendidikan formal di SD sampai ke perguruan tinggi, merupakan salah satu unsur yang dapat berperan strategis dalam mensosialisasikan pemahaman tentang masalah kemaritiman nasional kepada masyarakat luas, khususnya yaitu masyarakat pesisir. Dengan adanya pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman yang baik terhadap potensi sumber daya alam di wilayahnya semakin meningkat dengan adanya kepedulian mereka bisa mengelolanya dengan sebaik mungkin. Melihat kondisi masyarakat pesisir yang hanya mengandalkan sumber daya alam yang ada, menjadikan pendidikan di masyarakat pesisir juga semakin rendah, mereka menganggap bahwa dirinya tanpa sekolahpun sudah bisa mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Untuk itu, peranan lembaga pendidikan sangat penting bagi kehidupan seorang anak nelayan agar pekerjaan mereka disana tidak menjadi turun temurun.⁶¹

Penelitian ini mengacu pada pendidikan formal saja. Jadi, untuk melihat pendidikan formal dalam masyarakat Kelurahan Pacar Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Pendidikan formal itu menjadi salah satu acuan untuk seseorang

⁵⁹ Ferdinanda Sherly Noya, *dkk. Strategi Pembelajaran Pendidikan Informal pada Transfer Pengetahuan Kecakapan Ketog Magic*, Jurnal Pendidikan, Volume 2, Nomor 9, 2017, hlm 124

⁶⁰ Amiruddin Masri, *Pendidikan Anak Nelayan Pesisir Pantai Donggala*, Asian Journal of Environment, History and Heritage, Vol. 1, Issue. 1, 2017, hlm 226

⁶¹ Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm 118

agar bisa mencapai semua cita-cita dan keinginannya. Selain itu, pendidikan formal juga menjadi jalan terbaik bagi kehidupan masa depan seseorang. Sehingga pendidikan formal sangat penting untuk warga Negara Indonesia.

F. Indikator Keberhasilan Lembaga Pendidikan Formal

Lembaga pendidikan atau seorang guru merupakan variabel yang cukup dominan terhadap keberhasilan proses pembelajaran, karena guru lah bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di kelas. Faktor guru yang paling berpengaruh adalah kinerja guru, oleh karena itu mengajar atau *teaching* merupakan bagian dari pendidikan. Dimana peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang atau mengaransement berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu.⁶²

Mencetak generasi yang inovatif, komprehensif, cerdas, kreatif, dan produktif dibutuhkan interaksi dan peradaban yang unggul sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memfasilitasinya salah satunya yaitu lembaga pendidikan formal untuk mampu menjadi fasilitator dalam keberhasilan generasi-generasi yang hebat.

Tingkat keberhasilan lembaga pendidikan dalam pembelajaran di sekolah tidak bisa lepas dengan 5 aspek pendidikan yakni aspek pendidikan, aspek peserta didik, aspek metode pembelajaran, aspek alat media, dan aspek sarana prasarana. Sehingga keberhasilan harus dilihat secara rinci dengan adanya 5 aspek tersebut harus benar-benar memenuhi syarat dan standart pendidikan, dengan begitu sebuah pendidikan harus disertai aspek-aspek pendidikan yang memadai dan mencukupi.⁶³

Rizky Kurniawan, dalam jurnalnya dijelaskan bahwa tiga lingkungan utama dalam pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan di dalam UU No.2 Tahun 2003 yakni sekolah, masyarakat, dan keluarga, tempat dimana pembelajar tinggal memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber daya

⁶² Lilik Nofijantie, *Peran Lembaga Pendidikan Formal Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Siswa*, Conference Proceedings, Annual Internasional Conferences on Islamic Studies (AICIS XII), IAIN Sunan Ampel Surabaya, hlm 2959

⁶³ Ahmad Falah, *Studi Analisis Aspek-aspek Keberhasilan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN 01 Karang Malang Gebog Kudus*, Elementary, Vol 3, No 1. 2015, hlm 178

pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang maksimal. Tujuan pendidikan ini dapat menjadi wadah sosialisasi dalam menyalurkan nilai-nilai luhur, pengetahuan, ketrampilan dan bentuk tata perilaku lainnya bagi generasi muda demi menunjang keberlanjutan eksistensinya.⁶⁴

Lukman Nulhakim juga menjelaskan dalam jurnalnya yang mengutip dari jurnal Ihsan bahwa pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan.⁶⁵

Keberhasilan seseorang tidak lepas juga dari peranan lembaga pendidikan, dimana seseorang tersebut berhasil mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan lebih luas lagi dengan banyaknya pengalaman-pengalaman yang didapatkan di lingkup lembaga pendidikan. Keberhasilan itu juga berasal dari pembelajar yang mendapatkan kemudahan berinteraksi dengan seorang pendidik, selain itu sarana prasarana yang memadai. Sehingga pembelajar mampu bersaing dan bertahan hidup dengan tantangan ditengah tekanan global saat ini. Keberhasilan tersebut bukan hanya di dapatkan dari akademik saja melainkan dari bakat peserta didik dan bisa memiliki perilaku yang baik untuk di terapkan di dalam lingkungan masyarakat.

G. Status Sosial

Soerjono Soekanto dalam jurnalnya Wijianto mengartikan, status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajibannya.

⁶⁴ Rizky Kurniawan, H. *Revitalisasi Pendidikan Informal: Peranan Pembelajaran Bahasa Kedua pada Upaya Peningkatan Kualitas Generasi Muda Indonesia*. Jurnal Mabasindo, Volume 2, No. 2, Edisi 2018, hlm 37-38

⁶⁵ Lukman Nulhakim, *Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Eksistensi Pesantren Salafiyah di Pesantren An-Nur Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol 6, No. 1, 2012, hlm 36

Sedangkan menurut Mayer Soekanto berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi.⁶⁶

Status sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, prestisenya serta sejumlah hak dan kewajibannya. Status tidak hanya berarti kumpulan kedudukan seseorang dalam kelompok yang berbeda, tetapi status tersebut mempengaruhi kedudukan orang tersebut di dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda, karena di dalamnya ada hak, kewajiban dan privilese. Strata sosial juga memiliki indicator yang berbeda, tergantung dari yang dianggap berharga oleh masyarakat tersebut. Jika yang dihargai adalah pendidikan, maka orang yang memiliki pendidikan paling tinggi dianggap menduduki posisi tertinggi, dan sebaliknya.⁶⁷ Jika yang dihargai dari pekerjaan, maka bekerja atau tidak bekerja menjadi indicator status seseorang atas apa pekerjaan yang dilakukannya, dan jika apabila yang dihargai adalah materi maka, seseorang tersebut akan dihargai karena materinya dan akan menduduki lapisan paling atas di dalam masyarakat.

Sitorus, status sosial merupakan kedudukan seseorang di masyarakat, dimana didasarkan pada pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertical, yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang tinggi ke yang lebih rendah dengan mengacu pada pengelompokan menurut kekayaan kelas sosial berdasarkan unsur ekonomis.⁶⁸

Kedudukan atau status sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial. Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain,

⁶⁶ Wijianto, *Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo*, Al-Tijarah, Vol. 2, No.2, 2016, hlm 192

⁶⁷ Masni Erika Frmiana, dkk. *Mewah Menuju Rahmatullah : Pegaaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Masyarakat Mengenai Trend Pemakaman Mewah Masyarakat Muslim*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 2, No.4, 2014, hlm 285

⁶⁸ Julaiha, *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Minat Melanjutkan Perguruan Tinggi*, Jurnal Mahasiswa BK AN-NUR, Volume. 1, Nomor. 1, 2015, hlm 46

dalam lingkungan pergaulan, prestiesnya, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.⁶⁹

Untuk mengukur status seseorang menurut Pritim Sorokin dilihat dari:

- 1). Jabatan/Pekerjaan
- 2). Pendidikan
- 3). Kekayaan
- 4). Politis
- 5). Keturunan
- 6). Agama

Status didalam masyarakat sendiri bersifat subyektif maupun obyektif karena merupakan hasil dari usaha-usaha seseorang itu sendiri, maka dari itu status sosial itu tercipta dengan sendirinya mulai dari sifat keturunan atau diakibatkan oleh kelahiran, bahkan ada pula dari status sosial yang tercipta melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan status sosial tersebut.

Pengertian-pengertian diatas mengenai status sosial dapat di simpulkan bahwa, status sosial merupakan kedudukan seseorang didalam masyarakat yang mana nantinya kedudukan tersebut mengenai pekerjaan, jabatan, keturunan, agama, kekayaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dimana seseorang mendapat sebuah kehormatan, jika mereka kedudukannya di dalam masyarakat lebih tinggi dari masyarakat yang lain, karena pada dasarnya status sosial berarti membagi kedudukan didalam kelas-kelas yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Andi Kurniawati dalam jurnalnya dengan judul, “Peran Istri Nelayan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga”. Jurnal tersebut membahas tentang Peran Istri Nelayan yang ada di Desa Tasik Agung dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Lokasi penelitian di Desa Tasik Agung Rembang, yang mana diketahui bahwa Desa Tasik Agung adalah desa yang berada dipinggir pantai atau dikenal dengan masyarakat pesisir yang mata pencaharian masyarakatnya identik dengan Nelayan, dalam Jurnal tersebut untuk mengetahui bagaimana peran istri Nelayan itu sendiri dalam meningkatkan pendapatan Keluarga. Apakah Istri seorang nelayan juga ikut

⁶⁹ J. Dwi Narwoko dan Bambang, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm 152

membantu suami bekerja ataupun hanya berdiam diri di rumah, serta bagaimana pendapatan dari seorang nelayan itu sendiri. Jenis dan sumber data yaitu data primer yang meliputi wawancara dengan pihak yang terkait yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, kuisisioner. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah diolah dan diperoleh dari pemerintah setempat maupun pihak-pihak terkait. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, kuisisioner, serta populasi dan sampel.⁷⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode survei dengan memfokuskan pada pendapatan istri nelayan, selain itu menggunakan populasi dan sampel dengan 120 orang sebagai perwakilan dari keseluruhan istri nelayan, tetapi subyek penelitian dalam terdahulu hanya disebutkan istri nelayan yang seharusnya ditambah dengan adanya perwakilan dari nelayannya. Karena dalam pembahasan penelitian tersebut dijelaskan bahwa pendapatan istri nelayan terdapat dari peran seorang nelayan juga. Sedangkan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu membahas mengenai struktur sosial masyarakat pesisir pantai, jenis dan sumber datanya diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengambilan responden juga menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Penelitian yang dilakukan oleh Qoriah Saleha, dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan”, penelitian ini membahas mengenai struktur sosial yang terbentuk dalam kehidupan nelayandibangun oleh faktor-faktor yang kompleks. Struktur sosial sendiri di dalam masyarakat nelayan di pesisir pantai Kota Balikpapan terbagi atas 3 lapisan yakni nelayan buruh, nelayan pemilik dan pemodal atau yang disebut dengan lapisan atas (juragan atau bos kapal). Dengan menggunakan metode pengambilan sampling *disproportionatedstratified random sampling* dengan jumlah sampek sebanyak 5 %, dari jumlah populasi 48 responden. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan subyek penelitiannya yaitu masyarakat

⁷⁰ Andi Kurniawati, *Peran Istri Nelayan dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga*, Jurnal Saintek Maritim, Vol XVII, No. 1, 2017

nelayan di pesisir Kota Balikpapan Wilayah Kelurahan Manggar Baru dengan jumlah nelayan terbanyak dan masih aktif.⁷¹

Perbedaan Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada pergerakan sosial, penelitiannya dirasa kurang terjangkau dengan melihat adanya waktu saat dilakukan penelitian, referensi yang kurang, metode yang digunakan adalah random sampling dengan 48 responden, hanya disebutkan masyarakat nelayan saja, mungkin ditambah dengan dijelaskan masyarakat yang lain pekerjaan selain nelayan. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai struktur dan pelapisan sosial masyarakat pesisir pantai atau masyarakat nelayan, karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan, dengan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisa Dwi Arista dan Sri Sedar Marhaeni, dengan judul “Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Pentingnya Pendidikan Formal 12 Tahun (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi). Penelitian ini membahas mengenai pendidikan formal 12 tahun untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat nelayan terhadap pentingnya pendidikan formal 12 tahun, yang diketahui bahwa nelayan itu tidak miskin penghasilan juga diatas rata-rata, tetapi mereka selalu berharap agar bagi keluarga nelayan bisa mengatasi persoalan perekonomian yang mereka butuhkan. Hanya kesehatan juga yang mereka inginkan karena kerja membutuhkan tenaga dan otot, serta mengesampingkan pendidikan. Menurutnya, setinggi apapun pendidikan mereka tidak dapat mempengaruhi hasil melaut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan obyek penelitian masyarakat nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan dengan proses memilih sampel dengan pertimbangan *purposive sampling*, selain itu menggunakan *snowball sampling*, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Keabsahan

⁷¹ Qorih Saleha, *Kajian Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan*. Buletin PSP, Vol 21, No. 1, Edisi 2013, hlm 67-75

data dengan uji kepercayaan terhadap data yang diperoleh di lapangan selain itu peneliti juga menggunakan triangulasi teknik.⁷²

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu memfokuskan pada fungsi pentingnya pendidikan formal 12 tahun, referensi yang kurang, subyek penelitian harus dijelaskan masyarakat nelayan yang seperti dalam penelitian terdahulu hanya disebutkan masyarakat nelayan saja, subyek penelitian yang kurang. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah menggunakan teknik *Purposive Sampling*, data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan metode deskriptif kualitatif, membahas mengenai struktur dan pelapisan sosial masyarakat pesisir pantai, dan membahas mengenai persepsi masyarakat nelayan terhadap pentingnya pendidikan formal., dengan menggunakan triangulasi untuk pengujian keabsahan data.

I. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terciptanya sebuah persepsi masyarakat pesisir mengenai kehidupan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut berasal dari pengalaman-pengalaman hidup yang nyata. Pada dasarnya masyarakat pesisir tentunya memiliki berbagai macam dinamika sosial serta permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Dengan melihat hal tersebut dapat menimbulkan sebuah persepsi masyarakat yang mana menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi masyarakat tersebut melakukan suatu tindakan dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk itu dengan adanya aspek pendidikan ini untuk mengetahui juga hubungannya masyarakat dengan mobilitas untuk meningkatkan status sosial di masyarakat. Dengan adanya pendidikan dijadikan sebagai salah satu proses yang terbaik untuk memperoleh status sosial guna bisa dapat mensejahterakan masyarakat, disamping itu juga pendidikan juga bisa membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang berkualitas untuk melawan tantangan zaman pada era globalisasi saat ini.

⁷² Lisa Dwi Arista, dan Sri Sedar Marhaeni, *Persepsi Masyarakat Nelayan Terhadap Pentingnya Pendidikan Formal 12 Tahun (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, JPPKN, Vol 3, No. 1, 2018

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan harus terus dibangun serta diarahkan dengan baik, dengan salah satunya yaitu merubah persepsi masyarakat atau sudut pandang masyarakat terhadap pendidikan. Maka dari itu, didapatkan suatu kerangka berpikir bahwa dalam menghadapi permasalahan rendahnya tingkat persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terutama pendidikan formal yang ada di daerah masyarakat pesisir ditimbulkan adanya paradigma terhadap dunia pendidikan, persepsi mereka tentang pendidikan begitu negatif, yang diketahui banyak dampak negatif yang disebabkan banyaknya faktor-faktor negatif salah satunya adalah biaya pendidikan yang mahal, serta faktor negatif lainnya. Disisi lain juga menumbuhkan persepsi yang positif dalam masyarakat terhadap pendidikan harus dan wajib untuk dibangkitkan, diarahkan dengan berbagai proses, langkah, dan kebijakan guna membuat masyarakat akan sadar betapa pentingnya pendidikan formal untuk masa depan anak-anak nantinya yang akan meningkatkan serta mengubah status sosial yang ada dimasyarakat itu sendiri.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

